



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers Nomor : 01/Humas PMK/I/2015

TKI BERMASALAH DIHARAPKAN SELESAI JANUARI 2015

Jakarta (13/1) -- Jumlah Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), semakin tahun terus meningkat perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK hari ini di Jakarta, mengemukakan jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini sering terjadi karena adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari Negara. Sehingga pada saat itu Jumlah WNIO/TKIB jumlahnya membengkak. Melihat kondisi ini, pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri dan diharapkan Januari 2015 ini mulai menyelesaikan permasalahan TKI ilegal.

Permasalahan TKI ilegal yang bermasalah tersebut diharapkan segera diselesaikan mulai bulan Januari 2015. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah tenaga kerja yang bermasalah yang berada di luar negeri sekaligus menyiapkan penganggaran. Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang, di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak **20.379** orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak **26.428** orang.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, diantaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

Pada penutup rakor, Menko PMK Puan Maharani menyampaikan perlunya membuat suatu *grand desain* untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep *grand desain* tersebut telah selesai.

Biro Informasi dan Persidangan
Telepon/Fax : (021) 3453289, 3507679
Website : <http://www.kemenkopmk.go.id>